

BAB II

KONDISI SOSIAL KEAGAMAAN DI PALEMBANG

(1326-1423 H/1910-2002 M)

Uraian dalam bab ini akan membahas kondisi sosial keagamaan di Palembang yang terjadi semasa KH. Muhammad Amin Azhari hidup. Tepatnya yaitu antara tahun 1326-1423 H/1910-2002 M. Berdasarkan masa hidupnya, maka Kyai Cek Ming telah melewati masa pendudukan kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, masa Orde Lama, masa Orde Baru dan berakhir hingga masa reformasi. Sehingga uraian-uraian dalam bab ini tidak akan jauh bahasannya tentang kondisi sosial-keagamaan yang terjadi pada masa-masa tersebut.

Kondisi sosial keagamaan yang terjadi antara tahun tersebut akan dimulai dengan sedikit gambaran bagaimana Islam masuk ke Palembang dan proses Islamisasi yang terjadi saat itu. Kemudian dilanjutkan dengan kondisi sosial-keagamaan masa keresidenan Palembang. Pada fase ini juga akan bersinggungan langsung dengan masa kolonial Belanda. Karena memang sistem keresidenan sendiri merupakan produk kolonial Belanda yang dibuat untuk menghapus Kesultanan Palembang pada tahun 1823 M. Keresidenan Palembang sendiri meliputi seluruh wilayah yang kelak menjadi Provinsi Sumatera Selatan setelah masa kemerdekaan. Pemimpin pertamanya adalah Jan Izaak van Sevenhoven sebagai residen pertama.¹⁹ Kondisi sosial-keagamaan

¹⁹ Kms A. Panji; Sri Suriana, *Sejarah Keresidenan Palembang*. Jurnal Tamaddun, Vol. XIV: 2014. Hal. 129-146.

berupa tradisi keilmuan dan sosial yang terjadi pada masa inilah yang sedikit banyak berpengaruh dan menurun hingga ke masa-masa berikutnya.

Pembahasan kemudian akan dilanjutkan sampai masa pendudukan Jepang yang hanya beberapa tahun saja, kemudian ke masa Orde Lama dan Orde Baru, hingga ke masa Reformasi, sampai pada tahun dimana KH. Muhammad Amin Azhari wafat, yaitu tahun 2002 M.

A. Masuknya Islam dan Proses Islamisasi di Palembang

Islam telah ada di bumi Sriwijaya, khususnya di sekitaran kota Palembang sejak abad ke-7 M, atau awal-awal abad Hijriyah. Kesimpulan ini disampaikan dalam seminar "Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan" pada 29 November 1984. Oleh Majelis Ulama Indonesia Tingkat I Sumatera Selatan di Palembang.²⁰ Salah satu yang menjadi dasar kesimpulan ini adalah ketika Palembang masih menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya, sudah terdapat kelompok-kelompok Muslim, baik pedagang-pedagang Islam dari Timur Tengah yang datang dan bermukim di Palembang atau penduduk lokal. Atas izin penguasa dan pembesar Sriwijaya kala itu, para pedagang ini dapat menjalankan ajaran Islam di Kota ini.²¹

Tidak seperti Protestan dan Katolik yang membawa misi khusus kristenisasinya, para pedagang komunitas Muslim justru masuk ke Palembang dengan

²⁰ Idrus al-Kaf, *Tasawuf di Sumatera Selatan dari Abad ke-18 hingga Abad ke-21*, dalam Jurnal Ilmu Agama, Edisi Juni 2019, Th.20, No.1 Hal. 92-93. Lebih lanjut lihat K.H.O Gadjahnata dan Sri Edi Swasono, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (Jakarta: UI Press, 1986).

²¹ K.H.O Gadjahnata dan Sri Edi Swasono, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (Jakarta: UI Press, 1986). Hal. 20

membawa Islam yang damai.²² Artinya, para pedagang tersebut memang murni ingin berniaga. Masyarakat yang tertarik dengan perilaku komunitas Muslim tersebutlah yang membuat lambat laun masyarakat setempat mulai berinteraksi lebih jauh dan bertanya lebih lanjut mengenai agama yang dibawa oleh para pedagang itu. Komunikasi yang terjalin dengan baik itu akhirnya berkelanjutan. Hingga sedikit demi sedikit mulai banyak orang yang mengucapkan *syahadat*. Yang menarik, bahkan masyarakat setempat menawarkan anaknya untuk dinikahi. Maka terjadilah saluran kedua setelah saluran perdagangan, yaitu saluran perkawinan.

Dari mereka yang telah berkeluarga inilah akhirnya terbentuk komunitas penduduk beragama Islam. Selain karena murni berdagang, penyebaran Islam juga disokong dengan disebarkannya juru dakwah dan para wali yang khusus datang untuk meng-Islamkan penduduk lokal. Sehingga lambat laun penyebaran Islam makin meluas sepanjang abad ke-7 hingga abad ke-14. Yaitu abad sebelum tumbuh pemerintahan yang bercorak Islam menggantikan kekuasaan Sriwijaya. Memasuki masa-masa berkuasanya pemerintahan Islam, proses penyebaran Islam sempat berubah. Dari yang mulanya murni berdagang, kemudian berlanjut ke penyebaran Islam antar personal, lalu mulai secara bertahap para juru dakwah dikirimkan dan berdatangan, hingga akhirnya Islam kadang-kadang disebarkan melalui peperangan melawan pemerintahan kafir oleh kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia saat itu.²³

²² Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* (Bandung; Mizan, 1998) Hal. 93-94

²³ Husaini Husda, *Islamisasi Nusantara (Analisa Terhadap Discursus Para Sejarawan)*, Jurnal Adabiya, Vol. 18, No. 35, Agustus 2016. Hal. 24

Adanya pengaruh komunitas Muslim dalam proses Islamisasi juga diperkuat dengan adanya sumber-sumber sejarah Arab dan Cina yang menyatakan bahwa pada abad ke-9 M di Palembang telah terdapat sejumlah Muslim pribumi di kalangan masyarakat Kerajaan Sriwijaya. Mereka tidak hanya diberi hak sebagai warga kerajaan, tetapi juga berperan dalam perdagangan dan bahkan dipercaya oleh Pemerintah Sriwijaya untuk menjadi Duta Kerajaan ke Cina dan Arab.²⁴ Dengan adanya penduduk pribumi Muslim ini sebenarnya menunjukkan telah dimulainya Islamisasi di tengah-tengah masyarakat. Meski belum meluas dan merata, karena hanya berputar di kalangan masyarakat bawah, tetapi secara bertahap dan akhirnya meluas secara masif, mengingat selama lima abad Islam terus disebarkan oleh pemeluknya.

Sampai masa peralihan kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya ke Majapahit, proses Islamisasi masih belum bisa menjangkau elit kekuasaan. Barulah terlihat tanda dimulainya Islamisasi di kalangan elit petinggi kerajaan pada akhir-akhir masa kekuasaan Majapahit. Proses penyebaran Islam yang berjalan adalah dengan melakukan dakwah dan kajian secara sembunyi-bersembunyi. Hal ini persis seperti yang dilakukan nabi Muhammad di awal kenabiannya. Karena jika serentak Islam disebarkan dengan terang-terangan, maka akan terjadi kericuhan, yang bisa jadi membuat Islam tertolak secara massif oleh pemerintah dan masyarakatnya. Begitu juga ketika Ario Damar, seorang Adipati Kerajaan Majapahit di Palembang, memeluk Islam

²⁴ Lebih lanjut lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. (Bandung, Mizan, 1994) Hal. 25-31.

secara sembunyi-sembunyi atas ajakan Raden Rahmat ketika singgah di Palembang.²⁵ Islam diajarkan secara personal. Hal ini justru menjadi cara yang kuat untuk meyakinkan seseorang, apalagi seorang tokoh yang kelak akan memimpin kerajaan.

Ini terjadi sekitar akhir abad ke-15, ketika Palembang masih menjadi wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit yang beragama Hindu. Ario Damar, menurut cerita tutur atau babad Jawa dikenal pula sebagai tokoh yang dipercaya oleh Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, untuk membesarkan anak Brawijaya dari seorang putri Cina, yang dikenal sebagai Raden Fatah ini lahir dan besar serta dididik di Palembang bersama Raden Kusen. Raden Fatah-lah yang kelak mendirikan Kerajaan Demak, sebuah Kerajaan Islam di Pulau Jawa.²⁶ Di usia 20 tahun, Raden Fatah dikirim ke Pulau Jawa bersama Raden Kusen untuk memperdalam ilmu agama kepada Sunan Ampel. Atas bantuan Wali Songo, akhirnya Raden Fatah mendirikan Kerajaan Demak, yang menandai runtuhnya kerajaan Majapahit. Sejak itu dimulailah era kerajaan Islam. Kemudian secara terus menerus hingga beberapa abad setelah itu Palembang berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Maka terjadilah saluran Islamisasi berikutnya, yaitu melalui saluran politik.

Jika dilihat dari masjid sebagai sarana ibadah umat Islam, maka masjid pertama di Palembang berdiri sebelum tahun 1660. Meski terbakar dalam sebuah pertempuran ketika Mayor Joan van der Laen menyerbu Kota Palembang pada tahun 1659, tapi ini

²⁵ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: Logos, 1998).Hal 50.

²⁶ Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, IV, 1981) Hal. 148

menjadi pertanda bahwa proses Islamisasi mulai berkembang pada abad ke-17. Kemudian di tahun 1663 didirikan lagi masjid lainnya di kota Palembang.²⁷

Dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kedatangan awal Islam di Sumatera Selatan adalah abad ke-7 M. Akan tetapi, Islam baru mulai berkembang di wilayah ini pada abad ke-16 dan mengalami kemajuan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam (abad ke-17 dan 18) dan semakin bertambah di masa pemerintahan Kolonial Belanda (abad ke-19 dan awal abad ke-20).

Adapun faktor utama yang ikut mempercepat proses penyebaran Islam setidaknya ada 3 hal.²⁸ *Pertama*, Islam dalam ajarannya menekankan tentang ketuhanan yang esa, atau yang disebut dengan tauhid. Tauhid identik dengan nilai-nilai pembebasan dari ikatan-ikatan apapun yang dapat mengganggu nilai tauhid. Sehingga masyarakat pribumi yang mulanya tertekan baik karena pengaruh agama sebelumnya atau istiadat lokal serta pemerintah setempat, setelah Islam dikenalkan melalui para pedagang dan para juru dakwah, maka mereka berangsur-angsur beralih kepada Islam. Selain itu pula, Islam mengajarkan tentang konsep keadilan bahwa derajat setiap manusia bukan dinilai oleh manusia, tapi dari takwanya kepada Allah.

Faktor kedua, adalah karena ajaran Islam bersifat fleksibel. Daya lentur Islam tidak dibatasi dengan adat istiadat. Karena itu pula, kehadiran Islam tidak meruntuhkan tatanan nilai yang sudah mapan sebelumnya. Hanya saja butuh waktu agak lama untuk

²⁷ Rahim, Husni, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: Logos, 1998). Hal. 52

²⁸ Fachry Ali dan Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam; Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde BARu* (Bandung: Mizan, 1986). Hal 32-34

merubah kebiasaan masyarakat yang nilai-nilai budayanya menyalahi aturan syariat Islam. Faktor terakhir adalah sifat-sifat Islam tersebut justru berkebalikan dengan sistem dan ajaran yang dibawa oleh pihak kolonial. Sehingga dengan mudah masyarakat menyadari bahwa Islam adalah satu-satunya cara menangkal dan melawan kolonialisme Eropa.

B. Masyarakat Sumatera Selatan pada Masa Keresidenan Palembang

Bila dilihat secara geografis, wilayah yang pada masa kolonial Belanda disebut "Keresidenan Palembang", dibagi dalam tiga daerah: Kota Palembang, daerah Iliran (pedesaan di bagian hilir Sungai Musi), dan daerah Uluan (pedesaan pedalaman di hulu Sungai Musi yang dibatasi oleh pegunungan). Penduduk yang mendiami Iliran dan Uluan terbagi ke dalam beberapa *Afdeeling*²⁹ dan *Onderafdeeling*³⁰. Di bawah *Onderafdeeling* terdapat hirarki yang disebut marga yang membawahi beberapa desa. Kemudian dalam struktur masyarakat terdapat marga. Marga biasanya dipimpin oleh seorang kepala marga yang disebut *Pasirah*. *Pasirah* dibantu oleh beberapa asisten yang disebut *Pembarap*, *Kerio* dan *Ketib*. Mereka inilah para aparat yang merupakan ujung tombak pemerintah kolonial Belanda di wilayah pedesaan dan mereka pulalah "pejabat pemerintah" yang langsung bersentuhan dengan realitas sosial masyarakat.

²⁹ Sebuah wilayah administratif pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda setingkat Kabupaten.

³⁰ Sebuah wilayah administratif pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda setingkat Kawedanan (berada di bawah Kabupaten dan di atas Kecamatan).

Yang disebut dengan Kota Palembang sendiri pada masa kolonial meliputi wilayah di seberang Ilir Sungai Musi.³¹

Kemudian jika dilihat secara demografis, masyarakat Keresidenan Palembang baik pada masa kesultanan maupun kolonial terlihat sangat heterogen. Artinya masyarakat yang hidup di wilayah keresidenan saat itu bukan saja terbagi menjadi penduduk kota dan penduduk desa (Ilihan dan Uluan) yang tercatat sebagai penduduk asli, tetapi tidak sedikit para pendatang, baik para migran pribumi dari Jawa dan Sumatera, maupun para migran yang disebut Pemerintah Kolonial sebagai Timur Asing, yakni etnik Arab, Cina, dan Hindustan. Termasuk para pendatang adalah orang-orang Eropa, khususnya Belanda dan Inggris.³²

Penduduk asli saat itu terbagi kelasnya menjadi dua golongan. Golongan pertama yaitu golongan priyayi atau golongan yang mempunyai kedudukan terhormat dan memiliki garis keturunan sultan atau kaum ningrat, baik karena dari nasab kelahiran atau memang sengaja diangkat oleh Sultan itu sendiri. Golongan kedua adalah rakyat biasa. Jika ditelusuri, kedua golongan ini sudah ada sejak masa Kesultanan Palembang. Golongan priyayi itu sendiri pada masanya terdiri atas tiga tingkatan, yakni pangeran, raden, dan masagus. Seperti itu juga rakyat biasa, yang jika dilihat dari stratanya terbagi menjadi empat kelompok, yaitu orang Miji, orang Senan, orang yang menggadaikan diri, dan budak.³³ Hanya saja klasifikasi golongan

³¹ *Ibid.* Hal. 53.

³² *Ibid.* Hal. 54

³³ Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*. Hal. 61-63

masyarakat ini sudah tidak terlalu berpengaruh pada masa pemerintahan kolonial Belanda, dimana golongan priyayi tidak lagi berperan penting di tengah masyarakat, meskipun memang gelar-gelar keningratan masih sering dipergunakan ketika menyebutkan namanya.

Selain terdapat di Kota Palembang, rakyat biasa juga banyak terlihat di pedesaan. Seperti halnya di kota, penduduk yang tinggal di pedesaanpun terdiri atas dua kelompok yakni: penduduk Iliran (yaitu penduduk yang tinggal di desa-desa yang dekat dengan Kota Palembang, seperti Pegagan dan Komering Ilir) dan penduduk Uluan (yakni mereka yang tinggal di pedesaan yang jauh dari Kota Palembang/pedalaman). Penduduk liran dan Uluan ini mempunyai bahasa dan tradisi yang sedikit berbeda satu dengan lain. Sesuai dengan nama daerahnya, mereka sering disebut sebagai orang Ogan, Komering, Lematang Ranau, Pagaralam, dan sebagainya.³⁴

Kemudian selain penduduk pribumi yang tinggalnya di kota atau pedesaan, di kalangan masyarakat juga terdapat kelompok pendatang dari luar, khususnya Arab, Cina dan Hindustan yang telah berdiam lama di Palembang bahkan sejak masuk dan berkembangnya Islam ke Sumatera Selatan. Pada awalnya mereka ini datang sebagai pedagang yang mengadakan hubungan dagang dengan orang-orang Palembang.³⁵ Tetapi lama kelamaan mereka menetap bahkan menjadi bagian dari masyarakat itu

³⁴ Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang*. Hal. 54

³⁵ L.W.C. Van Den Berg, *Hadramaut & Koloni Arab di Nusantara* (Jakarta: INIS, 1989), Hal. 67.

sendiri. Sehingga yang terjadi justru terdapat wilayah-wilayah tertentu yang menjadi ciri khas tempat tinggal para pendatang tersebut, misal kampung Arab al-Munawwar di Seberang Ulu II dan Kampung Kapitan di Seberang Ulu I. Asimilasi yang terjadi antar etnis suku dan golongan inilah yang menjadi kekuatan berkembangnya sosial-keagamaan di Keresidenan Palembang. Kondisi Sosial-Keagamaan di Palembang Masa Keresidenan Palembang.

C. Kondisi Sosial-Keagamaan di Palembang Masa Keresidenan Palembang

Perkembangan tradisi keilmuan dan pengajaran agama di masa Keresidenan Palembang menjadi standar gambaran umum kondisi sosial-keagamaan masa itu hingga beberapa masa setelahnya. Hal ini dikarenakan pada masa keresidenan lah Islam mulai menyebar secara luas tidak hanya di kalangan elit. Tapi menyebar secara luas ke seluruh kalangan. Secara historis, pembentukan tradisi keilmuan dan pengajaran agama Islam di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, tampaknya telah dimulai pada era Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-18 ketika Islam sudah berhasil meluas dan menggantikan kerajaan sebelumnya yang bercorak Hindu-Budha. Hanya saja, kegiatan pengajaran ini berlaku hanya untuk kalangan elit kekuasaan.

Pasca runtuhnya kekuasaan para Sultan Palembang, yang ditandai dengan kekalahan Sultan Mahmud Badaruddin II dalam peperangan melawan Belanda pada 1823 M, tradisi keilmuan dalam bentuk penulisan karya-karya keagamaan dan pengajaran agama, yang pada mulanya berlaku di kalangan elit kekuasaan ini, mulai

menyurut. Sebaliknya, tradisi pengajaran agama di kalangan masyarakat Palembang semakin meningkat.³⁶

Menurut Husni Rahim, sebelum meluasnya pengajaran Islam di tengah masyarakat, keraton lah yang menjadi pusat pengajaran dan pengkajian Islam di Palembang. Tentu hanya terbatas kalangan elit saja yang dapat merasakan kajian ini. Semua sultan-sultan Palembang, sejak sultan pertama hingga sultan terakhir -misalnya Sultan Ahmad Najamuddin II (1821-1825 M), dikenal dekat dengan para ulama dan selalu mendukung bahkan mensponsori penulisan karya-karya keagamaan Islam hingga menghasilkan ratusan kitab dalam berbagai bidang keilmuan tradisional Islam (Tauhid, Tasawuf, Fikih, Tarikh, dan Ilmu Alquran).³⁷ Salah satu dari hasil kolaborasi ulama dan *umara* (pemimpin/pemerintah) adalah munculnya ulama-ulama terkenal yang produktif menghasilkan banyak karya, contohnya Syekh Syihabuddin bin Abdullah Muhammad pada masa Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, kemudian Syekh Kemas Fakhrudin pada masa Sultan Ahmad Najamuddin I (1757-1774 M), dan yang paling *masyhur* adalah Syekh Abdus Samad al-Palimbani di masa Sultan Muhammad Bahauddin (1774-1804 M), dan ulama-ulama lainnya.³⁸

Menurut Laporan Tahunan Residen Palembang, sejak tahun 1830-an (terutama tahun 1834), para pemuka agama sempat mengeluhkan kurangnya minat masyarakat

³⁶ Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang 1925-1942*. (Yogyakarta: IDEA Press, 2014)., Hal. 2.

³⁷ Rahim, Husni, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: Logos, 1998). Hal. 92.

³⁸ Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam* Hal. 92-93.

umat Islam untuk mendalami dan tekun beribadah. Namun sesudah tahun 1850 M, muncul berbagai indikasi bahwa kesadaran masyarakat dalam ibadah di Palembang menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Bahkan terdapat pandangan umum di kalangan pegawai pemerintah kolonial Belanda, bahwa masyarakat Kota sudah cenderung lebih saleh dan taat memenuhi kewajiban keagamaan mereka.³⁹ Hanya saja, pemerintah kolonial Belanda tidak terlalu khawatir dengan pesatnya perkembangan Islam saat itu. Karena belum dianggap ‘fanatik’ oleh penguasa Belanda saat itu. Kehidupan beragama yang ada di Palembang saat itu hanya sebatas menunaikan ibadah seperti halnya sholat Jumat atau puasa Ramadan. Tidak terlihat perilaku subversif di tengah masyarakat, atau gerakan-gerakan yang kiranya merugikan kolonial Belanda.

Namun, sejak tahun 1880-an, istilah ‘fanatik’ akhirnya muncul, salah satunya karena penampilan dan perilaku keagamaan yang kian mencolok. Seperti para pemuka agama dan kelompok-kelompok haji yang sudah banyak mengenakan jubah panjang warna putih, melilitkan serban di kepala, dan tasbih di tangan. Selain itu jamaah sholat Jumat juga nampak meningkat pesat, hingga bisa dikatakan susah untuk melewati lautan massa yang hendak menunaikan ibadah Jumat. Keadaan seperti ini belum terjadi pada masa sebelumnya.⁴⁰

Selanjutnya di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, meningkatnya kesadaran masyarakat Palembang nampak jelas terlihat dari kecenderungan untuk belajar agama

³⁹ Jeroen Peters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religijs Islam di Palembang: 1821-1942*, (Jakarta: INIS, 1997), Hal. 6

⁴⁰ Ibid Hal. 6-7

yang tinggi. Dari kegiatan belajar-mengajar agama inilah kemudian tradisi pendidikan Islam dan perkembangan sosial-keagamaan Islam di Palembang terbentuk. Mula-mulanya format pengajaran agama hanya dilakukan dari rumah ke rumah atau di langgar (mushola). Tradisi semacam ini justru menjadi keharusan pada masa itu dan tentu tidak dapat dilepaskan karena memang fasilitas yang belum memadai dari pemerintah, dan kondisi bangsa saat itu yang berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Tiga unsur penting dalam birokrasi keagamaan dan masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh yaitu: (1) pejabat agama di masa Kesultanan dan kolonial yang sering disebut Penghulu Nat Agama beserta stafnya, (2) para *sayyid* dari kelompok Alawiyyin yang berasal dari Hadramaut, dan (3) para ulama independen yang menyelenggarakan pengajian Alqur'an dan kitab di rumah atau di langgar.⁴¹ Ketiga unsur ini akhirnya menjadi satu sistem, yang tanpa salah satunya maka penyebaran syariat Islam akan terasa lumpuh.

D. Kondisi Sosial-Keagamaan di Palembang awal Abad ke-20

Jika sebelumnya di akhir abad ke-19, masyarakat Islam di Palembang sudah mendapat anggapan 'fanatik' dari penguasa Belanda, maka di awal ke-20, pola tradisi keilmuan dan pengajaran Islam sedikit berubah dan mengikuti arus zaman. Sedikit banyak pengaruh modernisasi mempengaruhi sistem belajar mengajar, yang nantinya memperlihatkan bagaimana kondisi sosial-keagamaan di Palembang masa itu.

⁴¹ Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial-Politik di Keresidenan Palembang*. Hal. 4

Sebenarnya pengajaran agama Islam dengan sifatnya yang non-formal dan tradisional masih bertahan sampai awal-awal abad abad ke-20. Laporan dalam Verslag van Het Inlandsh Onderwijs mencatat bahwa pada tahun 1910 masih terdapat 263 tempat belajar dengan 3000 murid.⁴² Pada tahun ini pula lahirnya KH. M. Amin Azhari dalam nuansa lingkungan yang sudah kental dengan kondisi lingkungan Islami. Sistem *halaqoh*⁴³ masih menjadi sistem yang banyak dilakukan saat itu. Baik di langgar-langgar atau rumah-rumah penduduk dan kediaman ustad atau kyai. Adapun tentang kapan proses terjadinya transformasi dari pendidikan non formal ke pendidikan yang bersifat formal tidak ditemukan data yang pasti. Namun, antara tahun 1902 M hingga tahun 1916 M nampak sekolah-sekolah Arab di kalangan komunitas Alawiyyin yang kurang lebih telah menunjukkan perubahan ke arah sekolah klasikal, meskipun belum sempurna pendidikan klasikal yang telah dimulai oleh kolonial Belanda. Bahkan telah ada upaya-upaya ke arah pembaharuan meskipun mendapatkan banyak tantangan.⁴⁴

Sementara di kalangan Alawiyyin Betawi, organisasi Jami'at Khair berhasil mendirikan sekolah dengan sistem Barat, meskipun pada awalnya juga mendapatkan banyak tantangan.⁴⁵ Tantangan ini tentu bukan tanpa sebab. Beberapa kalangan yang pro dengan sistem Barat menuduh pihak yang menentang sebagai kaum konservatif

⁴² Rahim, Husni, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: Logos, 1998. Hal. 172

⁴³ Kegiatan belajar-mengajar dengan ustad atau kyai duduk di hadapan muridnya sambil memberikan materi dari kitab-kitab, sedangkan para santri duduk membentuk setengah lingkaran. Sistem *halaqoh* atau biasa dikenal Sistem Weton ini adalah sistem tertua dalam pengajaran ilmu agama.

⁴⁴ *Ibid* Hal. 177-178

⁴⁵ Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Hal. 59-60.

dan kuno, tidak mau menerima perubahan. Namun, hal demikian terbilang wajar karena hal ini menunjukkan, masyarakat sudah punya kesadaran dan kewaspadaan yang tinggi. Kondisi pendidikan saat itu berpengaruh banyak terhadap kondisi sosial dan keagamaan yang terjadi masyarakat. Seiring waktu, masyarakat setempat mulai menyadari pentingnya belajar, terutama belajar agama. Sehingga yang terjadi adalah makin maraknya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

Meskipun saat itu sudah gencar diadakan pembaharuan metode dan sistem pembelajaran Islam di tengah masyarakat, namun kenyataannya nilai-nilai lama yang terkandung dalam sistem tradisional masih dipraktikkan. Di antaranya adalah keberadaan lembaga pendidikan Islam tradisional (yaitu rumah, langgar, dan masjid) yang nampaknya tidak hanya merupakan kekhasan wilayah Sumatera Selatan, tetapi mencerminkan kecenderungan secara umum di banyak tempat di Nusantara.

Pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di rumah berbentuk pengajaran agama Islam pada tingkat yang paling dasar, seperti mengucapkan dua kalimah syahadat, cara-cara melakukan ibadah sholat dan membaca ayat-ayat Alquran yang dibaca dalam sholat. Mula-mula pengajaran ini dilakukan di rumah dalam lingkungan keluarga. Jika seorang anak dianggap sudah harus mendapatkan pelajaran yang lebih mendalam lagi maka ia harus pergi ke rumah seorang guru atau Kyai. Atau bagi keluarga tertentu yang cukup terpandang dapat mendatangkan seorang guru atau Ulama untuk memberikan pelajaran agama Islam bagi anggota keluarga, kerabat dan

tetangga dekat.⁴⁶ Ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh para guru dan kyai tersebut tentu tidak hanya terfokus pada persoalan ibadah yang sifatnya kewajiban personal, tetapi juga tentang masalah sosial kemasyarakatan. Sehingga tercipta lingkungan sosial yang dinamis dan efektif dalam membangun minat Masyarakat.

Semakin hari semakin besar kesadaran masyarakat untuk mendalami ilmu agamanya. Semakin terbuka juga pandangan masyarakat dalam memahami agamanya. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi gerakan perubahan dan perkembangan Islam pada masyarakat Islam di keresidenan Palembang masa itu:

Pertama, masyarakat Muslim sudah menyadari betul pentingnya pendidikan yaitu sebagai upaya mencerdaskan umat Islam, di sisi lain pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Belanda belum dapat menyentuh banyak kalangan.

Kedua, munculnya ketidakpercayaan terhadap pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda, karena meniadakan pelajaran agama, dan beranggapan bahwa Belanda hendak melancarkan misi Kristenisasi.

Yang terakhir karena adanya spirit untuk mengadakan pembaharuan di kalangan masyarakat Muslim, terutama dipelopori oleh Muhammadiyah dan Al-Irsjad. Serta keinginan untuk memperluas kegiatan dakwah Islam di tengah masyarakat.

1. Konflik Kaum Tuo dan Kaum Mudo

Semakin luas perkembangan pemikiran Islam di tengah masyarakat, maka akan muncul perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan keagamaan. Perkembangan

⁴⁶ Departemen P & K Sumatera Selatan, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan*, (Palembang, Proyek IDKD Dep. P&K, 1985), Hal.24.

sosial keagamaan yang terjadi di kalangan masyarakat di keresidenan Palembang selama masa pemerintahan kolonial Belanda cenderung didominasi oleh peranan kalangan Muslim tradisional (*Kaum Tuo*) dari pada kalangan Muslim modernis (*Kaum Mudo*). Yang menarik adalah, justru mereka yang tergabung dalam kalangan tradisional lah yang telah memelopori upaya pembaharuan, baik di lembaga dan sistem pendidikan Islam atau dalam urusan ibadah *mu'amalah* (ibadah kemasyarakatan).

Hal ini menjadi berbeda sepenuhnya jika dibandingkan dengan kecenderungan perkembangan Islam modern di wilayah Minangkabau. Di mana kalangan Muslim modernis (*Kaum Mudo*) yang menjadi pelopor pembaharuan perkembangan Islam. Dari sini, dapat diketahui bahwa perkembangan pembaharuan yang terjadi di keresidenan Palembang sama sekali tidak mengikuti pola dan kecenderungan yang terjadi di wilayah Minangkabau atau wilayah lainnya di Indonesia. Karena itu, ini menjadi karakteristik utama bagaimana Islam berkembang di keresidenan Palembang selama masa pemerintahan kolonial Belanda.

Terdapat banyak perbedaan pendapat yang terjadi antara *Kaum Mudo* dan *Kaum Tuo*. Hanya saja perbedaan tersebut kebanyakan seputar bidang *furu'iyah* atau tidak termasuk ibadah-ibadah wajib yang mutlak hukumnya, seperti *talqin*, *qunut*, dan *tahlilan*. Suasana itu makin keruh pada tahun 1929 yaitu ketika *Kaum Mudo* menerbitkan brosur yang berisi kesepakatan dan pengumuman bahwa doa *talkin* hukumnya *bid'ah dholalah* atau mengada-ada dan haram dilakukan. Masalah ini

berbuntut hingga ke pengadilan antara dua kubu. Bahkan tidak hanya di pengadilan, konflik tersebut juga merembet pada saling ejek sehingga terjadi kekerasan.⁴⁷

Meskipun begitu, konflik keagamaan yang terjadi antara Kaum Tuo dan Kaum Mudo, sebenarnya justru malah membangun persatuan umat Islam. Ketika golongan Kaum Mudo hendak menganulir kegiatan ibadah yang sudah menjadi tradisi, misalnya *tradisi Mauludan Nabi Muhammad*, maka diadakanlah rapat bersama terbuka. Yang membahas tentang isu-isu dan permasalahan sosial-keagamaan yang terjadi pada masa itu, yang dapat menyebabkan konflik.

Kemudian pada tahun 1930 M beberapa tokoh terkemuka di Palembang menginisiasi berdirinya Majelis Pertimbangan Agama Islam (MPII).⁴⁸ Forum ini tentu saja disambut baik oleh semua kalangan, namun yang terjadi malah forum ini sering dijadikan forum debat *furu'iyah*, bukannya sebagai wadah *mufakat* yang mendamaikan antara dua kubu. Kemudian muncullah organisasi Ittihadul Oelama (IO) yang menunjukkan perannya sebagai upaya rekonsiliasi dan integrasi umat Islam. Meski tidak seutuhnya bisa menghentikan konflik antara dua kubu, namun seiring waktu ulama-ulama Palembang masa itu berhasil meredam tingginya kekisruhan akibat perbedaan pandangan dalam urusan keagamaan.

⁴⁷ Jeroen Peters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religi Islam di Palembang: 1821-1942*, (Jakarta: INIS, 1997), Hal. 159-160

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 169-170

E. Kondisi Sosial-Keagamaan di Palembang Masa Pendudukan Jepang

Bumi Nusantara memang selalu menarik perhatian bangsa-bangsa lain, bahkan hingga kini. Hal itu tidak terlepas dari berlimpah ruahnya kekayaan alam yang Indonesia miliki. Karena itu pula bangsa-bangsa penjajah saling berebut cara dan strategi untuk mendapatkan sumber kekayaan alam dari Indonesia. Setelah masa pendudukan kolonial Hindia-Belanda yang berlangsung selama beberapa abad lamanya, lantas kemudian menyusul invasi yang digencarkan Jepang ke Indonesia. Meski tidak berlangsung lama, justru pada masa pendudukan Jepang sangat terasa betapa Indonesia benar-benar diperas habis kekayaannya. Sistem pendidikan Belanda yang selama ini berkembang, semuanya diganti oleh bangsa Jepang dengan berorientasi pada kepentingan perang. Banyaknya perubahan yang digencarkan oleh Jepang tentu saja berpengaruh besar terhadap kondisi Sosial-Keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat saat itu.

Awalnya Jepang terlihat hanya meneruskan apa yang telah dimulai oleh Belanda. Seperti sistem pendidikan ala Barat. Sebelum akhirnya Jepang merombak total sistem tersebut dengan memasukkan doktrin Asia raya agar sesuai dengan tujuan serta maksud Jepang. Mengingat sebelum Jepang datang pendidikan hanya diberikan kepada kaum tertentu saja, sementara kaum rakyat biasa menikmati proses transfer ilmu melalui kajian-kajian yang digencarkan ulama-ulama di langgar atau rumah-rumah penduduk, maka di masa pendudukan Jepang hal ini dirubah, sehingga bisa dinikmati banyak kalangan. Tetapi tentu saja, hal ini bukan tanpa kepentingan. Jepang

segera menghimbau kepada semua masyarakat agar dapat membantu Jepang memenangkan perang.⁴⁹

Pengajaran di kelas-kelas menjadi ujung tombak strategi Jepang dalam melancarkan ideologi-ideologi yang mendukung kebijakan Jepang. Guru-guru diberikan pelatihan, tidak hanya di Palembang, tetapi hingga dikirim dan dipusatkan di Jakarta. Setiap daerah wajib mengirimkan utusan untuk mendapat arahan langsung dari pimpinan Jepang kala itu. Pelatihan itu berlangsung sampai 3 bulan lamanya, jangka waktu tersebut dirasa cukup untuk membuat para guru siap secara utuh mendukung kebijakan dan visi misi Jepang di Indonesia.⁵⁰

Strategi-strategi yang digencarkan Jepang ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi Sosial-Keagamaan yang terjadi di masyarakat. Banyak kajian-kajian agama yang semestinya diselenggarakan di langgar-langgar akhirnya harus tertinggal bahkan dihapuskan karena harus menjalani pemusatan latihan yang diadakan Jepang. Meski demikian, tradisi-tradisi sosial-kemasyarakatan setidaknya masih berlanjut dan masih terselenggara. Ulama-ulama lokal setempat tanpa lelah terus memberikan pengajaran agama kepada masyarakat, meski harus dilangsungkan dari rumah ke rumah. Seperti yang disampaikan oleh H. Hasanudin Nur, tokoh agama $\frac{3}{4}$ Ulu, bahwa ulama-ulama setingkat KH. Muhammad Amin di masa pendudukan Jepang, mula-mula mengajarkan ilmu tauhid (ilmu-ilmu agama dasar) di rumah-rumah sendiri. Kemudian seterusnya

⁴⁹ Pandu Winata, dkk. *Perkembangan Pendidikan di Palembang Pada Tahun 1942-1950*. E-Journal FKIP Unsri Indralaya, 2018

⁵⁰ *Ibid.* Hal. 7

diminta memberikan pelajaran di rumah-rumah penduduk, hal ini dikarenakan terbatasnya kesempatan yang diberikan oleh Jepang.⁵¹

F. Kondisi Sosial-Keagamaan di Palembang Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan Indonesia, kajian-kajian yang sempat tertunda dan keterbatasan masyarakat dalam memperoleh ilmu agama akhirnya berlangsung lancar kembali. Dunia pengajaran baik di masjid-masjid, mushola, atau majelis-majelis taklim di kota Palembang kembali bergerak seperti biasa. Materi-materi bela negeri dan bela bangsa semakin banyak disisipkan. Hal ini mungkin karena sisa-sisa semangat kemerdekaan yang masih menyelimuti masyarakat Palembang kala itu.

1. Kondisi Sosial-Keagamaan di Palembang Masa Orde Lama

Awal tahun 1960, di tengah kondisi sosial-keagamaan yang damai setelah kemerdekaan Indonesia diumumkan tahun 1945, tercetuslah gagasan Presiden Soekarno tentang Nasionalisme, Agama dan Komunisme. Lahirnya gagasan tersebut adalah kekhawatiran ancaman disintegrasi bangsa jika ketiganya tidak diselesaikan. Begitu juga yang terjadi di Palembang masa-masa itu. Palembang tidak terlepas dari gencarnya perkembangan ideologi komunisme, tetapi hal ini dapat diantisipasi dengan baik oleh ulama-ulama lokal yang banyak tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang sangat antipati terhadap gerakan komunisme.

⁵¹ Haiban Waluyo dan M. Hasan Asyari, *Peran Kyai Haji Muhammad Amin Azhari dalam Penyebaran Islam di Palembang*, Majalah Kontekstualita Vol. 30. 2015.

Sehingga masyarakat dan ulama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan turut turun tangan menghentikan gerakan ini. Dan yang terjadi adalah makin maraknya kegiatan-kegiatan agama yang digalakkan oleh tokoh agama setempat. Seperti halnya di daerah lain di seluruh Indonesia, kondisi Sosial-Keagamaan di Palembang juga sempat gempur oleh isu komunisme ini, hanya saja hal itu dapat diantisipasi dengan baik dengan koordinasi dan komunikasi yang baik antara masyarakat dan tokoh keagamaan setempat.

2. Kondisi Sosial-Keagamaan di Palembang Masa Orde Baru

Sekitar awal-awal tahun 1379-1390 H/1960-1970 M, masyarakat yang hidup di kota besar seperti Palembang dan daerah Uluhan khususnya, menyadari bahwa mereka hidup dalam masyarakat yang heterogen, penuh keanekaragaman. Banyak sekali perbedaan nilai budaya, norma hingga aturan-aturan yang berlaku sehingga mau tidak mau mereka yang saat itu hidup di tengah banyak perbedaan tersebut, harus menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Peristiwa konflik antar etnis pada umumnya menyadarkan mereka, terutama yang menjadi pendatang untuk selalu melakukan penyesuaian dengan penduduk asli, atau dengan suku bangsa lainnya yang ada di sana.⁵²

Yang terjadi berikutnya pada dekade antara tahun 1390-1400 H/1970-1980 M, konsep pertetangaan yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat banyak dipraktikkan oleh masyarakat setempat, terutama interaksi yang terjalin antara warga

⁵² Zusneli Zubir & Seeno, *Jakabaring; Seberang Ulu Palembang tahun 1972-2011*. (Padang; Balai Penerbitan Nilai Budaya Sumatera Barat, 2016) Hal 172

lokal dengan masyarakat pendatang. Peran tetangga, yang dalam Islam diajarkan bahwa mengutamakan tetangga dekat melebihi saudara yang jauh, diamalkan dengan baik dan bijak. Karena itu pula, setiap musibah yang terjadi pada sebuah keluarga, maka tetangganya yang lebih dahulu datang membantu. Demikian juga halnya yang terjadi ketika hari besar keagamaan tiba seperti Lebaran dan Natal. Saat Lebaran tiba misalnya, pemerintah setempat, baik pengurus RT, RW, hingga Camat, mengadakan *halal bihalal* dengan mengundang seluruh warga tanpa membedakan agama dan suku. Dalam kesempatan seperti itu, tidak nampak adanya perbedaan suku, semua berbaur dan berkomunikasi dengan bebas, karena menggunakan bahasa Indonesia.⁵³

Pada akhir-akhir masa Orde Baru, terutama dekade antara 1400-1410 H/1980-1990 M, kebanyakan aspirasi dan kehidupan sosial-keagamaan umat Islam saat itu sedang bergerak ke arah spektrum baru yang lebih dominan bersifat kebudayaan daripada politik.⁵⁴ Demikian juga yang terjadi pada di kalangan masyarakat Palembang saat itu. Kekuasaan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto saat itu dipahami masyarakat sebagai semangat perubahan keagamaan ke arah baru dan sudah cenderung ke arah kebudayaan Islam yang mesti digalakkan.

3. Kondisi Sosial-Keagamaan di Palembang Masa Reformasi

Kondisi seperti ini seterusnya berlanjut pada masa reformasi. Yang kemudian berbalik berorientasi kembali ke ranah politik, mengingat tumbanganya masa Orde Baru, sehingga kebebasan berpendapat dan berpolitik menjadi lebih luas.

⁵³ *Ibid*, Hal. 173.

⁵⁴ Muh. Syamsuddin, *Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru*. Jurnal Dakwah, Vol. XI 2010.

Sekitar tahun 1410-1421 H/1990-2000 M, kawasan Uluan banyak dihuni oleh berbagai suku bangsa, baik yang berasal dari Palembang sendiri, maupun dari luar Palembang seperti suku Batak, Padang, bahkan Jawa.⁵⁵ Yang menarik adalah, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, baik warga lokal atau pendatang, menyebabkan terjadinya perkawinan campuran (*amalgamasi*). Di kawasan Uluan terutama daerah Jakabaring di masa reformasi sudah biasa terjadi perkawinan silang antar suku dan etnis. Praktik kawin silang ini semakin menjamur dan banyak terjadi begitu kawasan Jakabaring dikembangkan. Orang Batak menikah dengan orang Jawa. Orang Palembang dengan orang Jawa, keturunan Tionghoa muslim menikah dengan orang Palembang dan seterusnya. Hal inilah yang menyebabkan akulturasi yang terjadi di masyarakat menjadi berkembang begitu pesat.

G. Ragam Komunitas Muslim di Palembang

Jika dilihat secara demografis, masyarakat Keresidenan Palembang baik pada masa kesultanan maupun kolonial hingga saat ini terlihat sangat heterogen. Artinya masyarakat yang hidup di wilayah keresidenan saat itu bukan saja terbagi menjadi penduduk kota dan penduduk desa (Ilihan dan Uluan) yang tercatat sebagai penduduk asli, tetapi tidak sedikit para pendatang, baik para migran pribumi dari Jawa dan Sumatera, maupun para migran yang disebut Pemerintah Kolonial sebagai Timur Asing, yakni etnik Arab, Cina, dan Hindustan. Termasuk para pendatang adalah orang-orang Eropa, khususnya Belanda dan Inggris.⁵⁶

⁵⁵ Zusneli Zubir dan Seno, *Jakabaring; Seberang Ulu Palembang Tahun 1972-2011*. Hal. 168

⁵⁶ *Ibid*, Hal. 54

Sampai saat ini ada tiga suku pendatang yang dominan di Palembang. Bahkan dalam setiap perhelatan acara antar etnis, tidak lepas tiga etnis keturunan turut meramaikan. Sebut saja warga keturunan Tionghoa yang diwakili oleh Persatuan Islam Tionghoa Islam (PITI), kemudian warga Arab diwakili oleh *Assyabab* (bujang-bujang) dari Kampung Arab di Kota Palembang, keturunan India yang diwakili Ikatan Keluarga Keturunan India (IKKI), serta masyarakat pendatang lainnya yang ada di Palembang.

1. Komunitas Tionghoa Muslim di Palembang

Konsep Tionghoa Muslim di sini meliputi tiga kategori. Pertama, Tionghoa Muslim yang hilang, yaitu migrasi awal komunitas Tionghoa Muslim ke Nusantara yang dipimpin oleh laksamana Cheng Ho. Kelompok ini dikatakan hilang karena telah membaur atau berasimilasi secara total dengan penduduk lokal. Kelompok itu adalah koloni dari Laksamana Cheng Ho yang datang ke Nusantara pada sekitar abad 15. Ekspedisi Cheng Ho tidak hanya meninggalkan catatan sejarah melainkan juga meninggalkan warisan kebudayaan yang ikut melebur menjadi identitas bersama masyarakat lokal di mana ia membentuk koloni. Bahkan penyebaran agama Islam tidak dapat dilepaskan dari koloni yang dibentuknya. Laksamana Cheng Ho berasal dari suku Hui yang beragama Islam, ia pun ikut serta dalam menyebarkan agama Islam, terutama madzhab Hanafi di tempat-tempat yang dikunjunginya.⁵⁷

Para migran yang berasal dari Provinsi Fukien bagian selatan adalah suku bangsa Hokkien di mana separuh lebih dari mereka berprofesi sebagai pedagang,

⁵⁷Herwansyah, Zaki Syaddad, *Tipologi Identitas Muslim Tionghoa di Palembang Sumatera Selatan*, Jurnal JIA, 2017. Hal 3.

selebihnya berprofesi sebagai petani dan nelayan tergantung di mana mereka tinggal. Sedangkan yang berasal dari Provinsi Kwantung yaitu orang Hakka sebagian bekerja sebagai pengusaha industry kecil dan sebagian lainnya bekerja di pertambangan. Orang-orang Teochiu kebanyakan bekerja sebagai petani atau bekerja sebagai kuli-kuli perkebunan. Orang-orang ini di Palembang dikenal dengan sebutan Cina Kebon, karena pekerjaan yang ditekuninya. Mereka ini pada masa kolonial memang didatangkan sebagai petani di berbagai perkebunan di Sumatera Timur. Sedangkan orang-orang Kwong Fu di pulau Jawa kebanyakan bekerja sebagai pengusaha, pemilik industri kecil dan berdagang. Namun, di Bangka mereka bekerja sebagai pekerja di tambang-tambangtimah, sementara di Palembang mereka menjadi buruh industri kecil.⁵⁸

Pada mulanya kelompok migran dari Tiongkok hanya terdiri dari laki-laki saja, baru pada abad ke 19 para perempuan ikut bermigrasi. Awalnya para imigran laki-laki berharap bahwa mereka akan kembali ke kampung halaman dan dikubur di sana dengan membawa kesuksesan dari daerah perantauan. Pemahaman seperti ini dipengaruhi oleh kepercayaan Xiao dan Zhong. Xiao berarti berbakti kepada leluhur. Konsep ini diwujudkan dengan merawat kuburan orang tua dan papan namanya terutama bagi kaum laki-laki. Sementara Zhong berarti berbakti kepada negaranya. Namun disebabkan karena prahara politik dan kesulitan akses banyak dari mereka memilih untuk menetap di perantauan dan tidak kembali ke kampung halamannya.

⁵⁸ *Ibid*, Hal 4-5

Komunitas Muslim-Tionghoa generasi kedua di Palembang dapat ditemukan pada (1) kelompok Muslim-Tionghoa migran yang memang telah memeluk Islam dari negeri Tiongkok. (2) kelompok migran Tiongkok yang konversi ke dalam agama Islam setelah menetap di Palembang.

Konversi agama para migran Tiongkok pada abad 17 dan 18 itu kebanyakan disebabkan oleh faktor pernikahan. Mereka disyaratkan untuk mengkonversi agamanya menjadi Islam dan bersunat jika ingin menikahi penduduk lokal. Kebanyakan kelompok dengan kategori kedua ini telah berasimilasi secara sempurna dengan mengganti namanya dengan nama Islam. (3) Para perempuan hasil dari pernikahan laki-laki migran Tiongkok dengan penduduk lokal. Untuk kategorisasi yang ketiga itu dianggap tidak merepresentasikan identitas Tionghoa.

Hal itu disebabkan karena masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan Patrilineal maka tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk meneruskan tradisi leluhurnya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebelum abad 19, hanya laki-laki saja yang bermigrasi ke Nusantara. Sebelum abad 19 mereka yang memiliki anak perempuan hasil dari perkawinan dengan penduduk lokal banyak diserahkan kepada penduduk asli. Bahkan hingga kini praktik tersebut kadangkala masih terjadi. Hal itu disebabkan oleh pola kekerabatan Patrilineal, di mana status perempuan tidak memegang peranan penting dalam menjaga tradisi keluarganya.⁵⁹

⁵⁹ Idi, Abdullah. *Bangka Sejarah Sosial Cina-Melayu*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009. Hal. 72

Kelompok Muslim-Tionghoa yang berasal dari generasi kedua akibat migrasi besar-besaran warga Tiongkok ke Nusantara pada awal abad ke-17 masih ada hingga sekarang. Meski sedikit namun pada masa Kesultanan Palembang Darussalam mereka diberikan kedudukan yang istimewa karena status agamanya. Keistimewaan status yang didapatkan antara lain: (1) diangkat sebagai pejabat pada masa Kesultanan, (2) berhak untuk menikahi keturunan bangsawan (3) diberikan tempat di daratan, karena status tanah adalah milik Sultan. Pada masa kesultanan suku Tionghoa diizinkan tinggal di Palembang dengan mendirikan rumah-rumah terapung di tepi Sungai atau “Wangkang Cina”, karena statusnya yang dianggap sebagai orang Asing.⁶⁰

Menariknya meski mereka telah benar-benar berasimilasi baik secara struktural (diangkat sebagai pejabat di lingkungan Kesultanan) maupun kultural diwujudkan dengan peran mereka dalam mengembangkan ajaran Islam, namun identitas Tionghoa masih dipertahankan. Seperti halnya gelar Baba dan Nona yang masih disematkan sebagai panggilan bagi mereka. Selain itu, beberapa masih mencantumkan nama marganya seperti warga Negara keturunan Tionghoa lainnya. Contoh dicantumkan nama Tionghoa dapat dilihat pada adpertensi kematian. Baba Amin Azhari misalnya dalam adpertensinya dicantumkan nama Tionghoanya yaitu Cek Ming. Adpertensi kematian adalah khas terjadi pada masyarakat Tionghoa. Tujuannya tidak lain agar banyak yang datang dan mendoakan jenazah.⁶¹

⁶⁰Herwansyah, Zaki Syaddad, *Tipologi Identitas Muslim Tionghoa di Palembang Sumatera Selatan*. Hal. 10-12

⁶¹*Ibid*, Hal. 19

2. Komunitas Arab di Palembang

Pada masa awal Pemerintahan Belanda, menurut Sevenhoven, orang Arab telah berjumlah sekitar 500 jiwa. Kebanyakan mereka hidup secara berkelompok dalam sebuah kampung.⁶² Pada umumnya orang Arab Palembang dikenal sebagai pedagang yang cukup sukses dan taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Pada masa Kesultanan sebagian mereka juga sering membantu Sultan dalam urusan agama. Pada masa ini perkampungan orang Arab Palembang dikepalai oleh seorang dari kalangan mereka yang diberi gelar Pangeran.⁶³ Pada masa Kolonial Belanda, komunitas Arab Palembang dikepalai oleh seseorang yang disebut Kapten Arab.⁶⁴

Berdasarkan peta yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1069 H/1659 M, diketahui bahwa kompleks permukiman masyarakat Arab waktu itu terdapat di depan kraton Kuto Gawang, atau di seberang Ulu. Peta ini tentu dibuat sebelum kraton Kuto Gawang dibumihanguskan oleh Belanda, karena detail tata letak (tata kota) masih terlihat, bahkan dilengkapi dengan daftar "legenda". Kraton Kuto Gawang saat ini sudah tidak menampakkan sisa-sisa kemegahannya, karena sudah hancur. Di atas reruntuhan kraton inilah PT. Pusri berdiri. Oleh karena itu lokasi permukiman

⁶² J.L. van Sevenhoven, Lukisan tentang Ibukota Palembang, (Jakarta: Bhratara, 1971), h. 35

⁶³ Rahim, Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, h. 60.

⁶⁴ Sejak sekitar tahun 1349 H/1930 M sempat terjadi kekosongan jabatan Kapten Arab ini sampai diangkatnya Sayyid Ahmad bin Alwi Almunawwar (biasa dipanggil Yip Cik Almunawwar) pada akhir 1355 H/1936 M. Tidak jelas apa penyebab kekosongan ini, selain kabar bahwa Kapitein Arab Palembang yang lama diberitakan "minggat". Lihat "Kapitein Arab Palembang", dalam *Pertja Selatan*, No. 142, 26 Nopember 1936, h. 4.

masyarakat Arab pada waktu itu terletak di seberang Pusri sekarang, yaitu daerah Patra Jaya, Kompleks Pertamina Plaju.⁶⁵

Saat ini keturunan Arab banyak bermukim di sepanjang Sungai Musi, baik di bagian Ilir, maupun yang di bagian Ulu, yang tepatnya berada di Lorong Asia dan kampung Sungai Bayas, Kelurahan Kotabatu, Kecamatan Ilir Timur 1; Lorong Sungai Lumpur di Kelurahan 9-10 Ulu, Kemudian di Lorong BBC di Kelurahan 12 Ulu, Lorong Almunawar di Kelurahan 13 Ulu, Lorong Al-Hadad, Lorong Al-Habsy dan Lorong Al-Kaaf di Kelurahan 14 Ulu, dan Kompleks Assegaf di Kelurahan 16 Ulu. Dalam masyarakat tersebut terdapat beragam paham yang berkembang. Diantaranya, Assegaf, Al-Habsy, Al-Kaaf, Hasny, Syahab (Shyhab), dan sebagainya. Secara Administratif, situs-situs yang berda di kawasan seberang ulu tersebut termasuk dalam wilayah Kecamatan Seberang Ulu II. Meski paham yang mereka anut tersebut berbedabeda, sebagian besar dari mereka masih bersaudara.⁶⁶

Meski mereka melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitar mereka, Masyarakat Komunitas Arab memiliki kebudayaan mereka sendiri. Contohnya tentang urusan Pernikahan. Menurut kebudayaan mereka, seorang perempuan keturunan Arab tidak boleh menikah dengan laki-laki Pribumi (masyarakat dari daerah sekitar). Namun, laki-laki keturunan Arab boleh menikah dengan perempuan Pribumi. Perempuan keturunan Arab yang menikah dengan laki-laki Pribumi akan dianggap aib

⁶⁵ Retno Purwanti, *Pola Permukiman Komunitas Arab di Palembang*, Prosiding Temu Ilmiah IPLBI, 2016. Hal. 182.

⁶⁶ *Kampung Arab Kota Palembang* dalam <http://palembang-tourism.com/> diakses 10 Desember 2019

oleh masyarakat Kampung Arab. Karena menurut mereka, Laki-laki-lah yang masih memiliki darah keturunan dari Rasulullah, sedangkan perempuan tidak. Oleh sebab itu jika perempuan keturunan Arab menikah dengan laki-laki Pribumi, maka garis dari Rasulullah tersebut akan terputus hanya pada perempuan tersebut, karena laki-laki Pribumi tidak memiliki darah keturunan dari Rasulullah.⁶⁷

3. Komunitas India di Palembang

Adapun orang Hindustan, kadang disebut orang Keling atau Tambi, jumlahnya tidak begitu banyak dan umumnya berprofesi sebagai pedagang.⁶⁸ Tentu saja setiap etnis yang bermigrasi ke Palembang memiliki ciri khasnya sendiri. Dalam hal ini, salah satu ciri khas yang dibawa oleh masyarakat pendatang dari India adalah kuliner. Salah satu kuliner yang sampai saat ini masih digandrungi adalah Martabak telur HAR. HAR sendiri merupakan singkatan dari pemiliknya, yaitu Haji Abdul Rozaq. Haji Abdul Rozaq merupakan warga negara Hindia yang merantau ke wilayah Palembang. Sejak 20 Ramadan 1366 H/07 Agustus 1947 hingga saat ini, martabak HAR menjadi penanda bahwa imigran India pernah menetap dan berasimilasi di Palembang.

Untuk lebih mempererat jalinan dengan sesama warga keturunan India, kemudian dibentuklah wadah organisasi sosial keagamaan dengan nama Ikatan Keluarga Keturunan India Indonesia (IKKII), yang telah terbentuk sekitar awal tahun 1431 H/2010 M. Dalam sebuah sesi wawancara, H. Hamzah Sya'b, yang merupakan Ketua

⁶⁷ *Kampung Arab Kota Palembang* dalam <http://palembang-tourism.com/> diakses 10 Desember 2019

⁶⁸ Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*, h. 60-61.

IKKII periode 1436-1439 H/2015-2018 M, yang dilantik pada 01 Jumadil Akhir 1436 H/21 Maret 2015 M lalu menuturkan, di zaman orang-orang tua dahulu, ada *India Assosiation* yang mewadahi warga keturunan India. Dan karena tidak ada regenerasi yang melanjutkannya, maka terputus pada saat itu. Selama berdirinya IKKII ini, sudah ada 20.000-an anggota IKKII yang tersebar di Palembang, bahkan hingga ke kabupaten/kota di Sumatera Selatan, yang terdiri dari berbagai macam profesi seperti PNS, tentara, polisi, dokter, pengacara, pengusaha, dan lainnya.⁶⁹

Maka jika bicara tentang warga keturunan India di Palembang, bukan hanya Martabak HAR yang populer, tetapi ada juga IKKII yang menjadi wadah sosial masyarakat keturunan India.

4. Komunitas Pendatang Lainnya

Komunitas pendatang dari luar Indonesia lainnya adalah imigran berkebangsaan Eropa umumnya adalah orang Belanda dan Inggris. Pada mulanya, mereka ini tinggal di loji atau di rakit dan membeli berbagai komoditas perdagangan lada, lilin, kemenyan, getah pohon pewarna, gading gajah dan kayu.⁷⁰ Sebagaimana diketahui, pendatang dari Belanda dan Inggris yang jumlahnya sedikit ini (minoritas) bahkan kemudian mendominasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Sumatera Selatan, karena mereka menjadi penguasa dan memiliki angkatan bersenjata (militer). Saat ini sulit sekali ditemukan warga Palembang keturunan Eropa yang

⁶⁹ IKKII; *Wadah Silaturahmi Warga Keturunan India*, dalam <http://www.ampera.co>, 2015, diakses 10 Desember 2019.

⁷⁰ Ibid., h. 61.

menetap di Palembang. Yang tersisa hanyalah produk kebudayaan seperti bangunan-bangunan gaya lama yang merupakan peninggalan bersejarah komunitas Eropa dan Belanda ini.

Selain imigran atau pendatang dari luar, penduduk Palembang juga terdiri atas imigran dari berbagai daerah di Indonesia, terutama Sumatera dan Jawa. Pendatang dari Jawa ada yang datang ke Palembang secara swadaya dan terdapat pula orang-orang Jawa yang sengaja didatangkan oleh Pemerintah Kolonial ke Palembang sebagai bagian dari kebijakan kependudukan dan kolonisasi yang mereka buat. Dalam periode sejak 18 Dzulqo'dah 1357 H-14 Rabiul Awal 1358 H/09 Januari-04 Mei 1939 M, misalnya, *Centrale Commissie voor Emigratie en Kolonisatie van Inheemschen* memindahkan tidak kurang dari 2.044 keluarga (7.631 jiwa) dari Pulau Jawa ke Palembang. Untuk dapat ikut bermigrasi mereka ini harus memenuhi 10 syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah.⁷¹

Sampai saat ini, masih banyak pemukiman-pemukiman warga keturunan luar Palembang, seperti suku Jawa, Sunda, Bugis dan lain-lainnya yang menetap di wilayah Palembang dan sekitarnya. Bahkan tidak sedikit yang membaaur di kalangan penduduk asli, sehingga lama kelamaan sulit ditemukan penduduk keturunan asli Palembang.

⁷¹ "Dalam tempo 5 Boelan Hampir 8000 orang ke Palembang", dalam *Pertja Selatan*, No. 71, 15 Juni 1939, h. 1. Sayangnya, dalam artikel ini tidak disebutkan ke-10 syarat dimaksud.